

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA-013.01.2.409201/2019**

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx (2) dan perubahannya

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (409201) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
- Sebesar : Rp. 10.094.070.000 (SEPULUH MILYAR SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
013.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 10.094.070.000
013.01.01.1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 10.094.070.000

C. Sumber Dana Berasal :

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------|
| 1. Rupiah Murni | Rp. 10.094.070.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. 0 |
| 2. PNBPNBPN TA Berjalan | Rp. 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. 0 |
| | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. 0 |
| | | 6. SBSN PBS | Rp. 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 10.094.070.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk Sekretariat Jenderal, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

DS: 5342-2726-7710-1072

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA-013.01.2.409201/2019

I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
 Kode>Nama Satker : (409201) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Kuasa Pengguna Anggaran : SOFYAN
 Bendahara Pengeluaran : ASRIANI
 Pejabat Penanda tangan SPM : SISMOLO

Halaman : IA . 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		10.094.070.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		10.094.070.000
2 Program	013.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM		10.094.070.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		
Indikator Kinerja Program	01.01	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7,1 indeks	
	01.02	Nilai Reformasi Birokrasi	85 Nilai RB	
	01.03	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85 Nilai LAKIP	
Output Program	01	Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan HAM		
Indikator Output Program	01	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kementerian Hukum dan HAM	2,52 indeks	
Kegiatan	1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		10.094.070.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham.		
Indikator Kinerja Kegiatan	01.01	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.		
	01.02	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.		
	01.03	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel		
	01.04	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan		
	01.05	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel.		
	01.06	Jumlah Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar		
	01.07	Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan		
Output Kegiatan	1558.777	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1,00 Layanan	758.218.000
	1558.777	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1,00 Layanan	758.218.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	33 Dokumen	
	02	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	1 Layanan	
	03	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	1 Layanan	
	04	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	1 Layanan	
	05	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel	1 Layanan	
	06	Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat	1 Layanan	
	01	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	0 Unit	
	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	0 unit	
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	0 unit	
	04	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	0 m2	
	05	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	0 m2	
Output Kegiatan	1558.994	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	9.335.852.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.01.2.409201/2019
I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409201) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Kuasa Pengguna Anggaran : SOFYAN
Bendahara Pengeluaran : ASRIANI
Pejabat Penanda tangan SPM : SISMOLO

Halaman : IA . 2

Output Kegiatan	1558.994	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	9.335.852.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	

Jakarta, 5 Desember 2018
Sekretaris Jenderal

ttd.

Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.01.2.409201/2019
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409201) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman I B. 1

						Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	10.094.070.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	10.094.070.000			(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

(Dalam Ribuan)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	RpLN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.01.2.409201/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
 Kode / Nama Satker : (409201) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
 Kewenangan : (KD)

Halaman II.1

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409201	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	6.536.587	3.557.483	-	-	-	10.094.070		
013.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	6.536.587	3.557.483	-	-	-	10.094.070		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	6.536.587	3.557.483	-	-	-	10.094.070		
1558.777	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	-	758.218	-	-	-	758.218	20.51	
01	RM	-	758.218	-	-	-	758.218	060	
1558.994	Layanan Perkantoran	6.536.587	2.799.265	-	-	-	9.335.852	20.51	
01	RM	6.536.587	2.799.265	-	-	-	9.335.852	060	
	J U M L A H	6.536.587	3.557.483	-	-	-	10.094.070		

Jakarta, 5 Desember 2018
 Sekretaris Jenderal

ttd.

Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
 NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.01.2.409201/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409201) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : III.1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409201	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	573.964	787.413	680.688	858.562	1.036.436	1.361.376	787.413	858.562	787.413	787.413	858.562	716.268	10.094.070
		51 BELANJA PEGAWAI	502.814	502.814	502.814	502.814	502.814	1.005.628	502.814	502.814	502.814	502.814	502.814	502.819	6.536.587
		52 BELANJA BARANG	71.150	284.599	177.874	355.748	533.622	355.748	284.599	355.748	284.599	284.599	355.748	213.449	3.557.483
	013.01.01.1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	573.964	787.413	680.688	858.562	1.036.436	1.361.376	787.413	858.562	787.413	787.413	858.562	716.268	10.094.070
		51 BELANJA PEGAWAI	502.814	502.814	502.814	502.814	502.814	1.005.628	502.814	502.814	502.814	502.814	502.814	502.819	6.536.587
		52 BELANJA BARANG	71.150	284.599	177.874	355.748	533.622	355.748	284.599	355.748	284.599	284.599	355.748	213.449	3.557.483

Jakarta, 05 Desember 2018
Sekretaris Jenderal

ttd.

Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.01.2.409201/2019
IV. A B L O K I R**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409201) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV A.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.01.2.409201/2019
IV. B C A T A N**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409201) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV B.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001